

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah membawa perekonomian Indonesia dibawah kendali Lembaga Moneter Internasional (IMF), dan pada minggu kedua bulan Juli 1997, kurs rupiah mengalami kejatuhan mendekati Rp.3.000; per dollar dari sebelumnya Rp. 2.432;

Menghadapi kondisi nilai tukar rupiah yang semakin terpuruk dengan jumlah cadangan devisa yang semakin tergerus, pada tanggal 8 Oktober 1997 pemerintahan Soeharto akhirnya meminta bantuan teknis dan dukungan dana jangka panjang kepada IMF. Kunjungan tim IMF ke Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997 kemudian menghasilkan kebijakan IMF pertama di Indonesia dalam menangani krisis finansial yang terjadi pada Negara Indonesia. Surat kesediaan yang bertajuk *Memorandum on Economic and Finance Policies* (MEFP) disepakati oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Soedradjad Djiwandono.

Sebagai timbal balik atas kesepakatan pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang terkandung dalam memorandum tersebut, IMF

mengumumkan janji paket bantuan finansialnya kepada pemerintah Indonesia sebesar 43 Milliyar US\$ (Ishak Rafick, 2007 : 407). Melalui mekanisme inilah kemudian IMF memegang kendali atas kebijakan yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup persoalan politik dan hukum di Indonesia. Jika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan garis kebijakan yang mereka sepakati, maka IMF tidak segan-segan mengancam untuk tidak mencairkan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Tekanan-tekan yang diberikan IMF kepada pemerintahan Soeharto telah menyebabkan semakin parahnya kondisi krisis yang dihadapi Indonesia. Kebijakan anggaran ketat yang dijalankan oleh Soeharto atas saran IMF telah mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan, termasuk perusahaan yang dimiliki keluarga Soeharto dan kroninya. Kebijakan penghapusan subsidi yang juga merupakan komponen yang ditekankan IMF telah berimbas pada kekacauan sosial dan kerusuhan. Pada Mei 1998, karena kesepakatan antara IMF dan Soeharto, pemerintah mencabut subsidi bahan pokok, dan menaikkan harga minyak dan listrik. Kebijakan ini menyulut penolakan keras dari rakyat dan tak lama kemudian Soeharto mengundurkan diri dari kekuasaannya.

“Memanasnya intensitas ketegangan ekonomi politik domestik ini kemudian mengundang reaksi internasional berupa perubahan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia, yang semakin mendorong kejatuhan Soeharto dari tampuk kekuasaan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengambil keputusan untuk mengakhiri periode kekuasaannya di Indonesia yang telah berlangsung selama 32 tahun. (Zainuddin Djafar, 2006 : 145)

Akan tetapi, kejatuhan Soeharto tidak berarti berakhirnya tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia. Naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto, justru menjadi fase di mana kebijakan ekonomi pemerintah lebih diprioritaskan kepada restrukturisasi perekonomian Indonesia dengan menitikberatkan pada implementasi kondisionalitas IMF.

“Bahkan pada masa pemerintahan Habibie, Indonesia juga melakukan perubahan dalam hal pola pinjaman dengan IMF, dari pinjaman siaga (stand-by arrangement) dengan masa pengembalian 3-5 tahun menjadi fasilitas pinjaman yang diperluas (*Extended Fund Facility*) dengan masa pengembalian 4-10 tahun dari total pinjaman sebesar SDR 4,7 milyar (US\$ 6,2 milyar) untuk sisa 26 bulan. (Salomo Simanungkalit, 2002 : 16)

Berubahnya pola pinjaman Indonesia dengan IMF ini bermakna bahwa Indonesia harus mengadopsi program penyesuaian struktural dalam jangka waktu yang lebih panjang dan dengan kondisionalitas yang lebih ketat.

Terdapat dua tekanan IMF yang menonjol pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pertama, terkait dengan kasus Bank Bali, pada 13 Agustus 1999 IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya membongkar tuntas skandal Bank Bali. Bahkan pada 15 September 1999, dengan tegas IMF menyatakan bahwa skandal Bank Bali harus segera dituntaskan oleh pemerintah Indonesia, jika tidak IMF mengancam akan menghentikan pencairan pinjaman kepada Indonesia.

“berhubungan dengan persoalan skandal Bank Bali ini, hubungan pemerintah Indonesia dengan IMF sempat mengalami kemacetan. Pada 16 September 1999, IMF menangguhkan pengiriman misinya ke Indonesia meskipun masih akan terus memantau keadaan. (Salomo Simanungkalit, 2002 : 18)

Kemudian IMF mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah, terutama dalam hal pengungkapan kasus Bank Bali. Dalam hal ini Badan

Pemeriksa Keuangan, yang terus menahan-nahan dan menolak untuk mempublikasikan laporan lengkap hasil investigasi auditor internasional terhadap skandal Bank Bali. Kedua, berkaitan dengan kasus kekerasan di Timor Timur, pada 5 September 1999 secara terang-terangan IMF mengancam akan menghentikan pinjaman milyaran dollar AS untuk Indonesia jika pemerintah gagal menghentikan kekerasan di Timor Timur. IMF juga mengatakan akan segera mengirimkan tim investigasi ke Timor Timur untuk melihat kebutuhan ekonomi Timor Timur setelah wilayah itu memutuskan merdeka dari Indonesia.

Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden pada Oktober 1999 menandai kembali pulihnya hubungan Indonesia dengan IMF pasca kemandekan pada masa pemerintahan B.J. Habibie terkait dengan skandal Bank Bali. Namun demikian, membaiknya hubungan Indonesia dan IMF bukan berarti bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid dapat luput dari tekanan IMF dalam berbagai kebijakan ekonomi. Bahkan kebijakan Presiden Wahid untuk mempublikasikan hasil audit skandal Bank Bali tersebut juga tidak terlepas dari tekanan IMF. Pada bulan Februari tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan rencana kenaikan harga BBM dengan alasan merupakan bagian kesepakatan dengan IMF. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan membatalkan rencana kenaikan harga BBM tersebut karena hal ini dapat menghalangi upaya Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional.

Reaksi protes dan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakatpun terjadi menentang upaya pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini. Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pencabutan subsidi BBM harus dilakukan pemerintah karena kalau tidak pemerintah akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana pinjaman dari IMF. (The Jakarta Post, 22 Februari 2000). Dari pernyataan Abdurrahman Wahid terkait dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia saat itu berada di bawah tekanan IMF untuk menghapuskan subsidi BBM jika pemerintah menginginkan pinjaman dari IMF dapat terus mengucur.

Hal ini tentu saja memicu demonstrasi dan protes di berbagai daerah, menentang rencana kenaikan harga BBM di tengah-tengah kondisi perekonomian rakyat yang belum stabil. Selain itu, DPR juga belum menyepakati usulan kenaikan harga BBM oleh pemerintah yang berdasarkan rencana akan direalisasikan pada 1 April 2000. Bahkan dalam rapat antara Komisi VIII DPR RI dengan TIM Pokja Tarif Pemerintah pada 30 Maret 2000, mayoritas anggota dewan meminta pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM (Republika, 31 Maret 2000). Akhirnya, setelah muncul berbagai protes dan penentangan dari DPR, pemerintah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2000. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM sampai mekanisme pemberian subsidi bisa dilakukan. (Republika, 1 April 2000). Akan tetapi, keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM ini tidak dapat dimaknai bahwa

pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid tidak memenuhi sepenuhnya keinginan IMF.

Namun demikian, pemerintah menunda implementasi kebijakan tersebut karena maraknya protes dan unjuk rasa dari masyarakat serta penentangan dari DPR.

Keputusan Abdurrahman Wahid untuk menaikkan harga bahan bakar minyak kemudian semakin memperburuk citra dirinya di mata rakyat, sebagai presiden yang tidak memperhatikan persoalan ekonomi yang tengah dihadapi rakyat. Setelah sebelumnya pada pertengahan tahun 2000, meskipun tidak terbukti, Abdurrahman Wahid tersangkut skandal korupsi bernilai trilyunan rupiah. Kemudian pada bulan Februari dan April tahun 2001, DPR menyampaikan kecaman kepada Presiden Abdurrahman Wahid atas dugaan korupsi dan inkompetensi. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan dan mengabaikan tuntutan agar ia mengundurkan diri. Krisis politik kemudian semakin memanas pada akhir Juli 2001, terutama ketika Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit untuk membekukan DPR. Akan tetapi para petinggi polisi dan TNI menolak untuk mentaati dekrit presiden tersebut. Akhirnya pada tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sidang darurat untuk menurunkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya konflik antar elite pemerintahan di Indonesia menjadi penyebab timbulnya konflik hubungan antara IMF dengan pemerintahan Abdurahman Wahid seperti panasnya hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif
2. Konflik hubungan yang terjadi antara IMF dengan Pemerintah Indonesia terlihat ketika IMF menunda pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Indonesia
3. Situasi-situasi dalam negeri seperti penolakan terhadap IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia serta intervensi asing pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid menambah beban pemerintahan Abdurahman Wahid serta menciptakan hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah Indonesia dengan IMF
4. Kondisi ekonomi Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor internal dalam negeri saja, tetapi faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan asing ikut mempengaruhi juga

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pembatasan pada faktor-faktor internal dan eksternal konflik hubungan International Monetary Foundation (IMF) dengan pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid tahun 1999 – 2001. Hal ini dilakukan agar penelitian ini tersusun sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah pada uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah :

Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang menyebabkan adanya konflik hubungan antara IMF dengan pemerintah Indonesia pada masa Presiden Abdurahman Wahid ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya konflik hubungan antara IMF dengan pemerintah Indonesia pada masa Presiden Abdurahman Wahid

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan tulisan mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia
2. Memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai hubungan IMF dengan pemerintah Indonesia pada masa Presiden Abdurahman Wahid

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Tema yang diambil dalam penelitian ini adalah hubungan IMF dengan pemerintah Indonesia pada masa Presiden Abdurahman Wahid. Penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Nasional Kontemporer. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi, sesuai dengan tema yang diambil, dengan harapan peneliti dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan politik dan ekonomi pemerintah

pada saat itu. Adapun skup temporalnya meliputi sepanjang kurun waktu 1999 – 2001, sedangkan skup spacialnya meliputi masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid.

Sumber data yang mendukung tema dalam penelitian diharapkan diperoleh di Perpustakaan Unila, Perpustakaan Daerah Lampung, toko-toko buku, internet, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data-data yang diperoleh kebanyakan berupa tulisan-tulisan, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bidang ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu sejarah.